Menakar Efektivitas Transformasi Sistem Informasi Keuangan Daerah: Studi Komparatif SIMDA dan SIPD pada Pemerintah Kota Ambon

Alend Talla[1], Victor Ernest Huwae[2]
[1,2]**Universitas Pattimura** -[1]*alendtalla33@gmail.com*
-[2]*vickyhuwae@gmail.com*

Abstrak— *This study aims to explore the implementation of regional financial information systems through a comparative study of the Regional Government Information System (SIPD) and the Regional Management Information System (SIMDA) in the Ambon City Government. This research employs a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving regional financial management officials at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Ambon City. The findings indicate that SIPD implementation has not been optimal due to technical and organizational challenges, as well as limited human resource capacity. Consequently, SIMDA continues to be used as a supporting system, resulting in the parallel operation of two systems in regional financial management. SIPD is used for budgeting and financial administration, while SIMDA remains in use for financial reporting and accountability. This practice leads to work duplication, data inconsistencies, reporting delays, and an increased risk of recording errors. Comparatively, SIPD offers advantages in national integration, data standardization, and control, but faces limitations in flexibility, ease of use, system stability, and dependence on central servers and network infrastructure. SIMDA is considered more stable, flexible, and easier to operate, but has limitations in national integration. The study concludes that the quality of local government financial reports is influenced not only by compliance with accounting standards but also by information system quality, infrastructure readiness, human resource competence, and user acceptance. Therefore, SIPD evaluation and improvement, better system integration, and continuous capacity building are necessary..*

Keywords: Financial Reporting Quality; Local Government; SIMDA; SIPD.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pengawasan atas seluruh sumber daya keuangan daerah. Pengelolaan tersebut mencakup pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seluruh sumber pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pendanaan penting bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Ambon. Data Pemerintah Kota Ambon menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai sekitar 74,9% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.253.250.793.839 (Pemerintah Kota Ambon, 2023). Besarnya proporsi pendapatan transfer tersebut menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel, termasuk pengawasan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana yang diterima. Pemerintah daerah karena itu perlu didukung oleh proses pengelolaan keuangan dan sistem informasi yang mampu menjamin keterpaduan data sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong keterpaduan pengelolaan informasi pemerintahan daerah adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penerapan SIPD merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan mengenai kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2018, serta kebijakan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. SIPD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem informasi yang memuat informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam satu platform. Melalui integrasi tersebut, SIPD diharapkan dapat menyediakan data yang terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan serta evaluasi pembangunan daerah. SIPD juga diharapkan mendukung koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, keberhasilan penerapan SIPD tidak hanya diukur dari tersedianya aplikasi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut mendukung proses kerja pemerintahan dan menghasilkan informasi yang berkualitas (Setiawan et al., 2023)

Pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan SIPD pada tahun 2021. Penerapan tersebut diawali dengan sosialisasi, diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD), dan pelatihan bagi sekitar 250 aparatur yang terdiri atas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala subbagian keuangan, kepala subbagian perencanaan, dan bendahara (Pemerintah Kota Ambon, 2021). Meskipun telah dilakukan kegiatan pengenalan dan pelatihan, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan dan ketidakstabilan jaringan internet, keterlambatan penginputan data, serta belum meratanya pemahaman aparatur dalam mengoperasikan aplikasi. Kendala implementasi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan SIPD dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pada periode awal penerapan, SIPD digunakan terutama untuk proses penganggaran, sedangkan proses penatausahaan dan pelaporan masih memerlukan dukungan aplikasi lain, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Financial Management Information System (FMIS). Pada tahun 2023 terdapat perkembangan karena penggunaan SIPD telah menjangkau tahap penganggaran dan penatausahaan. Namun, berdasarkan observasi awal, proses pelaporan masih menghadapi hambatan sehingga pemerintah daerah kembali memanfaatkan SIMDA untuk menyelesaikan sebagian proses penyusunan laporan keuangan. Kondisi penggunaan dua platform yang berbeda ini berpotensi menimbulkan pekerjaan berulang, ketidaksinkronan data, tambahan waktu pemrosesan, serta meningkatnya kebutuhan koordinasi antarunit kerja.

SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan secara lebih terstruktur, efisien, dan akurat serta memudahkan penyediaan informasi bagi manajemen dan pemeriksaan (BPKP, 2008). Penelitian Pilat dan Sondakh (2018) juga menjelaskan peran SIMDA dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Ambon, SIMDA pernah digunakan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pada pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2017 dan 2018, Pemerintah Kota Ambon memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan SIMDA relevan digunakan sebagai pembanding dalam mengkaji penerapan SIPD.

Meskipun demikian, perolehan opini audit tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan aplikasi yang digunakan. Opini BPK atas laporan keuangan ditentukan melalui pemeriksaan terhadap kewajaran penyajian informasi keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh sebab itu, perbedaan opini yang diperoleh pada periode penggunaan SIMDA dan periode penerapan SIPD perlu dianalisis secara hati-hati dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti kualitas sumber daya manusia, tata kelola data, pengendalian intern, kesiapan infrastruktur, serta proses transisi sistem. Dalam uraian kondisi awal Pemerintah Kota Ambon, periode penerapan SIPD juga dihadapkan pada opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)/Disclaimer dalam pemeriksaan LKPD, termasuk pada laporan keuangan tahun anggaran 2022. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk menelaah hubungan antara implementasi sistem informasi dan kualitas laporan keuangan, tanpa mengasumsikan bahwa penggunaan satu aplikasi secara langsung menjadi penyebab tunggal atas opini audit.

Secara konseptual, SIPD dan SIMDA memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu pemerintah

daerah mengelola keuangan dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaannya terletak pada pengembang, arsitektur, cakupan, dan mekanisme pengelolaan sistem. SIPD dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dirancang sebagai sistem terintegrasi secara nasional, sedangkan SIMDA dikembangkan oleh BPKP untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Peralihan menuju SIPD diharapkan memperkuat integrasi data dan proses bisnis pemerintahan. Namun, transisi sistem yang tidak diikuti kesiapan organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan teknis yang memadai dapat menimbulkan hambatan operasional. Ketergantungan SIPD pada akses berbasis jaringan, misalnya, dapat memengaruhi kelancaran pekerjaan ketika koneksi internet atau kapasitas sistem mengalami gangguan. Selain itu, proses koreksi data yang memerlukan dukungan teknis dari pengelola sistem pusat dapat memperpanjang waktu penyelesaian masalah. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi tantangan pada aspek kualitas sistem, kesiapan pengguna, dan infrastruktur. (Toding & Evi Maria, 2023) bahwa penerapan SIPD di Kota Medan belum berjalan optimal karena kualitas sistem yang belum memadai serta terbatasnya waktu bimbingan teknis, sehingga sejumlah satuan kerja perangkat daerah belum terbiasa menggunakan sistem tersebut. (Setiawan et al., 2023) mengidentifikasi keterbatasan fasilitas komputer dan rendahnya kapasitas jaringan internet sebagai faktor yang menghambat pelaksanaan SIPD. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020) juga menunjukkan bahwa kekurangan pada sistem dan keterbatasan sarana-prasarana dapat menyebabkan keterlambatan proses penginputan, sehingga diperlukan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur yang memadai. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem informasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan penerapannya, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan dukungan teknis yang menyertainya.

Permasalahan serupa terlihat dalam implementasi SIPD di Pemerintah Kota Ambon. Selain kendala jaringan dan kompetensi pengguna, penggunaan SIPD secara bersamaan oleh banyak OPD dapat meningkatkan beban akses sistem. Uraian mengenai kondisi tersebut juga disampaikan dalam penelitian (Wisnu Jabarul Hakim, 2019), mencatat adanya gangguan aplikasi ketika digunakan secara simultan serta perlunya pengaturan waktu penginputan untuk mengurangi risiko kesalahan atau gangguan sistem. Di sisi lain, penggunaan SIPD dan SIMDA secara bersamaan dapat menimbulkan persoalan integrasi, terutama apabila data yang diinput pada satu aplikasi harus disesuaikan kembali pada aplikasi lainnya. Situasi tersebut berpotensi mengurangi efisiensi proses kerja dan memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif keberhasilan *sistem informasi (Information System Success Factors)*. Perspektif ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem dipengaruhi oleh keterlibatan dan dukungan pimpinan, partisipasi pengguna, pelatihan dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas data dan informasi, kesiapan infrastruktur teknologi, kesesuaian sistem dengan proses organisasi, serta dukungan teknis dari pengembang atau instansi pusat (Petter, DeLone, dan McLean 2013). Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai landasan untuk memahami mengapa sistem yang secara kebijakan dirancang terintegrasi belum tentu dapat diimplementasikan secara optimal pada tingkat pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk mengkaji pengalaman implementasi SIPD dan SIMDA di Pemerintah Kota Ambon serta keterkaitannya dengan kualitas LKPD.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat persoalan yang perlu dikaji, yaitu kesenjangan antara tujuan penerapan SIPD sebagai sistem terintegrasi dengan praktik pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Ambon yang dalam periode tertentu masih membutuhkan SIMDA untuk mendukung penyusunan laporan. Penelitian ini penting karena penggunaan dua sistem berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan, kendala rekonsiliasi, keterlambatan proses, dan tantangan dalam menjaga konsistensi data. Selain itu, pengalaman Pemerintah Kota Ambon memperoleh opini WTP pada periode penggunaan SIMDA dan menghadapi opini TMP/Disclaimer pada periode penerapan SIPD merupakan konteks empiris yang perlu ditelaah lebih lanjut. Penelitian ini tidak menempatkan opini audit sebagai satu-satunya ukuran kualitas laporan keuangan, melainkan sebagai salah satu informasi hasil pemeriksaan yang perlu dibaca bersama aspek relevan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi SIPD dan SIMDA dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon; mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan kedua sistem, khususnya berdasarkan perspektif Information System Success Factors; serta menganalisis kontribusi dan keterbatasan masing-masing sistem dalam mendukung kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini juga membandingkan penerapan SIPD dan SIMDA dari aspek keterpaduan proses, kemudahan

penggunaan, dukungan teknis, kualitas informasi, efisiensi, dan kontribusinya terhadap proses penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian sistem informasi akuntansi sektor publik, khususnya mengenai faktor-faktor keberhasilan implementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam memperkuat penerapan SIPD, meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki infrastruktur dan tata kelola data, serta mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pengembang sistem. Pada akhirnya, perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel, sehingga kualitas LKPD dan tata kelola keuangan daerah dapat ditingkatkan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Ambon. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi pengalaman, persepsi, serta praktik aparatur pemerintah dalam mengoperasikan kedua sistem informasi tersebut, termasuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman langsung dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIMDA dan SIPD. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yaitu Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran, dan Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kota Ambon. Pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan pada tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing bidang dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dan komprehensif mengenai implementasi kedua sistem.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi terhadap praktik pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen yang berkaitan dengan implementasi SIMDA dan SIPD, dokumen pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penggunaan berbagai sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh sekaligus membandingkan informasi yang disampaikan informan dengan kondisi dan dokumen empiris yang tersedia.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan pengorganisasian data, reduksi data, pengelompokan atau kategorisasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditelaah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan aspek implementasi SIMDA dan SIPD, meliputi dukungan pimpinan, keterlibatan pengguna, kompetensi dan pelatihan aparatur, kualitas data dan informasi, kesiapan infrastruktur teknologi, kesesuaian sistem dengan proses organisasi, serta dukungan teknis dari pengembang sistem. Kategori tersebut mengacu pada perspektif *Information System Success Factors* yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian.

Tahap berikutnya adalah melakukan perbandingan antara implementasi SIMDA dan SIPD berdasarkan pengalaman informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung. Perbandingan diarahkan untuk mengidentifikasi kelebihan, keterbatasan, faktor pendukung, dan faktor penghambat masing-masing sistem dalam mendukung proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai kontribusi kedua sistem terhadap kualitas LKPD Pemerintah Kota Ambon serta merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi sistem informasi keuangan daerah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria yang lazim diterapkan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. **Kredibilitas (*Credibility*)**
   Kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi empiris di lapangan. Pengujian dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari ketiga informan, hasil observasi, serta dokumen pendukung seperti LKPD dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI. Selain itu, dilakukan *member check* dengan mengonfirmasi kembali informasi dan interpretasi hasil wawancara kepada informan agar sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka.
2. **Transferabilitas (*Transferability*)**
   Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dipahami dan dijadikan referensi dalam konteks pemerintah daerah lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menyajikan deskripsi secara rinci mengenai karakteristik objek penelitian, kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon, proses implementasi SIMDA dan SIPD, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Dengan demikian, pembaca dapat menilai relevansi temuan penelitian apabila diterapkan pada kondisi daerah yang memiliki karakteristik serupa.
3. **Dependabilitas (*Dependability*)**
   Dependabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keterlacakan proses penelitian. Peneliti mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian, mulai dari penentuan informan, pelaksanaan wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, proses analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi tersebut menjadi dasar untuk menelusuri kembali proses penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh tahapan analisis yang sistematis.
4. **Konfirmabilitas (*Confirmability*)**
   Konfirmabilitas bertujuan memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data empiris, bukan semata-mata subjektivitas atau asumsi peneliti. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan setiap temuan dan interpretasi dengan bukti hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang relevan. Peneliti juga menjaga transparansi dalam proses analisis sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat ditelusuri berdasarkan sumber data yang digunakan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi SIMDA dan SIPD serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kedua sistem dalam mendukung kualitas LKPD Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian selanjutnya digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi organisasi dan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Implementasi SIPD dan SIMDA di Pemerintah Kota Ambon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan melalui sistem informasi keuangan di Pemerintah Kota Ambon belum sepenuhnya berlangsung dalam satu platform yang terintegrasi. Dalam praktiknya, SIPD digunakan terutama pada tahapan penganggaran dan penatausahaan, sedangkan SIMDA masih dimanfaatkan untuk mendukung proses akuntansi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pola penggunaan tersebut memperlihatkan bahwa proses peralihan dari SIMDA menuju SIPD belum sepenuhnya tuntas, sehingga kedua aplikasi masih digunakan secara berdampingan. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan persoalan teknis aplikasi, tetapi juga menggambarkan tantangan perubahan proses kerja organisasi. Aparatur pengelola keuangan harus menyesuaikan diri dengan dua sistem yang memiliki mekanisme, struktur data, dan karakteristik operasional berbeda. Selain melakukan input pada SIPD, aparatur juga perlu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaporan dapat diolah dan disajikan melalui SIMDA. Akibatnya, proses kerja menjadi lebih panjang karena terdapat tahapan penyesuaian dan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dimasukkan.

Penggunaan dua aplikasi secara bersamaan berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan, peningkatan beban kerja, dan ketidaksinkronan data. Perbedaan klasifikasi akun, nilai transaksi, maupun waktu pencatatan dapat memerlukan proses rekonsiliasi tambahan. Apabila pengendalian dan verifikasi tidak dilakukan secara memadai, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan memperlambat penyusunan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan Mergel et al. (2019), yang menjelaskan bahwa transformasi digital sektor publik dapat menghadapi hambatan pada tahap implementasi ketika organisasi belum sepenuhnya siap

menghadapi perubahan proses dan kompleksitas sistem. Hasil Penelitian juga menjelaskan bahwa SIPD yang terhubung dengan sistem pusat membutuhkan akses jaringan dan dukungan teknis dari pengelola pusat. Ketika terjadi kesalahan penginputan yang memerlukan koreksi, pemerintah daerah harus menyampaikan permintaan melalui fasilitas bantuan atau help desk. Proses menunggu respons dan penyelesaian kendala tersebut dapat memperpanjang waktu kerja. Dengan demikian, persoalan implementasi SIPD di Kota Ambon berkaitan dengan kesinambungan layanan sistem, kecepatan penanganan masalah, dan kemampuan sistem menyesuaikan kebutuhan operasional pemerintah daerah.

Perbandingan Karakteristik SIPD dan SIMDA

Perbandingan implementasi menunjukkan bahwa SIPD dan SIMDA mempunyai keunggulan dan keterbatasan yang berbeda. SIPD dirancang sebagai sistem terintegrasi secara nasional dengan struktur data, kode rekening, dan prosedur yang distandarkan. Karakteristik tersebut mendukung keseragaman informasi, konsistensi proses, pengendalian, serta kebutuhan konsolidasi data pemerintah daerah secara nasional. Namun, dalam pelaksanaannya di Kota Ambon, SIPD masih menghadapi keterbatasan fleksibilitas, ketergantungan pada jaringan dan server pusat, serta kendala akses dan layanan teknis. Sebaliknya, SIMDA dinilai lebih fleksibel dan lebih mudah dioperasikan dalam memenuhi kebutuhan teknis pelaporan keuangan daerah. Sistem ini dinilai lebih responsif untuk proses pengolahan dan penyusunan laporan karena tidak sepenuhnya bergantung pada akses sistem terpusat sebagaimana SIPD. Akan tetapi, SIMDA memiliki keterbatasan dalam hal integrasi dan standardisasi data secara nasional. Dengan demikian, keunggulan SIMDA pada aspek operasional tidak serta-merta menjadikannya lebih unggul dalam seluruh aspek tata kelola informasi keuangan daerah.

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya pertukaran keunggulan *(trade-off)* antara standardisasi dan fleksibilitas. SIPD lebih kuat dalam membangun keseragaman dan integrasi nasional, sedangkan SIMDA lebih adaptif terhadap kebutuhan operasional lokal. Temuan ini sejalan dengan Alajmi et al. (2023), yang menekankan pentingnya kesesuaian antara faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan pengguna dalam penerapan sistem pemerintahan digital. SIPD memiliki manfaat yang diharapkan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standardisasi, tetapi keterbatasan kemudahan penggunaan serta kondisi pendukung dapat mengurangi efektivitas pemanfaatannya. Sebaliknya, SIMDA yang lebih sederhana cenderung lebih mudah diterima dalam pekerjaan operasional. Hal ini sejalan dengan Mamary et al. (2025), yang menempatkan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung sebagai faktor yang relevan dalam penggunaan sistem pemerintahan digital.

Tabel 3.1 Perbandingan Karakteristik SIPD dan SIMDA

Aspek	SIPD	SIMDA
Orientasi sistem	Terintegrasi dan terstandar secara nasional	Dikembangkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah
Integrasi data	Lebih kuat untuk keseragaman dan konsolidasi nasional	Lebih terbatas dalam integrasi lintas daerah
Fleksibilitas	Relatif terbatas dalam penyesuaian kebutuhan lokal	Relatif lebih fleksibel dan adaptif
Kemudahan operasional	Menghadapi kendala penggunaan dan tahapan input	Dinilai lebih mudah dioperasikan untuk pelaporan
Ketergantungan infrastruktur	Bergantung pada jaringan dan akses server pusat	Lebih responsif dalam lingkungan operasional daerah
Keterbatasan utama	Gangguan akses, fleksibilitas, dan respons dukungan teknis	Keterbatasan standardisasi dan integrasi nasional

Sumber: Diolah dari hasil analisis laporan penelitian.

Kualitas Informasi dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Kualitas informasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan nilai dan kesesuaian klasifikasi akun, tetapi juga oleh relevansi, kelengkapan, konsistensi, serta ketepatan waktu penyajiannya. SIPD memiliki potensi untuk memperkuat konsistensi informasi melalui standardisasi struktur data dan prosedur pengelolaan keuangan. Keseragaman tersebut penting untuk mendukung konsolidasi informasi pemerintah daerah dan meningkatkan transparansi. Akan tetapi,

manfaat standardisasi belum dapat diperoleh secara optimal apabila proses input, akses sistem, dan penyelesaian kendala teknis mengalami hambatan.

Dalam konteks Kota Ambon, kendala jaringan, akses server, kompleksitas tahapan input, serta kebutuhan memperoleh dukungan dari pengelola pusat dapat memperlambat penyelesaian proses administrasi dan pelaporan. Keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap ketepatan waktu tersedianya informasi untuk kebutuhan pengendalian, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Al-okaily dan Al-kofahi (2023) menegaskan bahwa ketepatan waktu merupakan bagian penting dari kualitas informasi dalam sistem informasi keuangan. Informasi yang akurat tetapi terlambat tersedia dapat berkurang kegunaannya bagi pihak yang membutuhkan.

SIMDA, berdasarkan hasil analisis dalam laporan, dinilai lebih membantu proses penyusunan laporan karena fleksibilitas dan kemudahan operasionalnya. Kemampuan untuk memproses informasi secara lebih responsif menjadi keunggulan ketika pemerintah daerah menghadapi kebutuhan penyelesaian laporan dalam waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan Mensah et al. (2020), yang menekankan pentingnya kemampuan sistem pemerintahan elektronik menyediakan informasi secara tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Meskipun demikian, kecepatan penyusunan laporan melalui SIMDA perlu tetap disertai pengendalian atas validitas, konsistensi, dan kesesuaian data dengan standar yang berlaku. Demikian pula, standardisasi SIPD perlu didukung peningkatan stabilitas sistem dan layanan teknis. Oleh karena itu, kualitas informasi yang baik mensyaratkan keseimbangan antara akurasi, konsistensi, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu, bukan hanya keunggulan pada salah satu karakteristik.

Dampak Implementasi SIPD dan SIMDA terhadap Kualitas LKPD

Penggunaan SIPD dan SIMDA secara paralel menimbulkan konsekuensi terhadap proses penyusunan LKPD. Ketika data penganggaran dan penatausahaan dikelola melalui SIPD, sedangkan proses pelaporan masih memanfaatkan SIMDA, aparatur perlu memastikan kesesuaian informasi yang berasal dari kedua aplikasi. Perbedaan struktur, klasifikasi, atau waktu pencatatan dapat memerlukan rekonsiliasi tambahan. Kondisi tersebut meningkatkan kompleksitas proses dan membuka kemungkinan terjadinya inkonsistensi apabila tidak didukung prosedur verifikasi yang memadai. Dampak lainnya adalah bertambahnya beban kerja dan risiko keterlambatan. Penggunaan dua sistem menuntut aparatur melakukan penyesuaian, pemeriksaan ulang, dan pengolahan data pada platform yang berbeda. Situasi ini dapat mengurangi efisiensi kerja serta menghambat penyelesaian laporan sesuai jadwal. Dalam perspektif kualitas laporan keuangan, keterlambatan penyajian informasi dapat menurunkan relevansi dan kegunaan LKPD bagi pemerintah daerah, DPRD, auditor, maupun masyarakat.

Laporan penelitian mengaitkan kondisi implementasi tersebut dengan pengalaman Pemerintah Kota Ambon memperoleh opini WTP pada tahun anggaran 2017 dan 2018 ketika SIMDA digunakan, serta opini TMP/Disclaimer pada periode penerapan SIPD sebagaimana diuraikan dalam laporan. Perbedaan tersebut merupakan konteks empiris yang penting untuk dianalisis, tetapi tidak dapat langsung dimaknai bahwa aplikasi SIPD menjadi penyebab tunggal penurunan opini atau bahwa SIMDA secara otomatis menghasilkan opini WTP. Opini BPK merupakan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dengan demikian, implementasi sistem informasi perlu dipahami sebagai salah satu unsur dalam keseluruhan lingkungan pengendalian dan pelaporan keuangan. Sistem yang mengalami gangguan dapat meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan, tetapi kualitas LKPD juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, ketepatan pencatatan transaksi, rekonsiliasi, pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap regulasi. Temuan ini sejalan dengan Mergel et al. (2019), yang menunjukkan bahwa transformasi digital sektor publik harus dilihat dari dampaknya terhadap kinerja organisasi dan akuntabilitas, bukan semata-mata dari keberadaan teknologi. Kala et al. (2024) juga menekankan pentingnya kualitas layanan dan dukungan sistem bagi keberlanjutan penggunaan layanan pemerintahan elektronik. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dualisme SIPD dan SIMDA belum memberikan dukungan yang optimal terhadap proses penyusunan LKPD. Persoalan utama bukan semata-mata keberadaan dua aplikasi, melainkan belum terbangunnya integrasi proses, data, dan prosedur kerja di antara keduanya. Oleh karena itu, perbaikan perlu diarahkan pada penyelarasan data, penguatan rekonsiliasi, peningkatan kualitas sistem, dan penataan proses bisnis agar penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Analisis Implementasi Berdasarkan *Information System Success Factors*

Temuan penelitian dapat dijelaskan melalui perspektif *Information System Success Factors* yang menempatkan keberhasilan sistem informasi sebagai hasil interaksi antara faktor organisasi, pengguna, informasi, infrastruktur, dan dukungan teknis. Dalam konteks Pemerintah Kota Ambon, faktor-faktor berikut relevan untuk menjelaskan belum optimalnya penerapan SIPD dan masih digunakannya SIMDA sebagai sistem pendukung. Pertama, dukungan pimpinan dan tata kelola implementasi. Penerapan sistem baru memerlukan arahan, koordinasi, pengawasan, serta keputusan organisasi yang konsisten. Penggunaan dua aplikasi dalam tahapan pengelolaan keuangan menunjukkan perlunya penguatan tata kelola transisi agar seluruh OPD memiliki prosedur dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Dukungan pimpinan perlu diwujudkan bukan hanya melalui kebijakan penggunaan SIPD, tetapi juga melalui pemantauan kendala dan penyediaan sumber daya untuk mengatasinya. Kedua, partisipasi pengguna dan pengembangan kapasitas aparatur. Pelatihan awal merupakan langkah penting, tetapi perubahan sistem dan pembaruan fitur menuntut pendampingan yang berkelanjutan. Pengguna perlu memahami bukan hanya cara mengoperasikan aplikasi, melainkan juga keterkaitan proses penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. Keterlibatan aparatur dari bidang anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi menjadi penting agar permasalahan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak pada tahapan berikutnya. Ketiga, kualitas data dan informasi. Penggunaan dua sistem menuntut konsistensi kode rekening, klasifikasi transaksi, nilai, dan periode pencatatan. Oleh karena itu, prosedur rekonsiliasi dan validasi data perlu diperkuat. Data yang telah dimasukkan ke dalam SIPD harus dapat ditelusuri dan disesuaikan secara terkontrol ketika digunakan dalam proses akuntansi dan pelaporan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan informasi. Keempat, kesiapan infrastruktur teknologi. Ketergantungan SIPD pada jaringan dan server pusat menjadikan stabilitas koneksi, ketersediaan perangkat, serta kapasitas akses sebagai prasyarat penting. Pemerintah daerah perlu menyiapkan infrastruktur dan prosedur kerja alternatif yang sesuai ketentuan ketika terjadi gangguan, sedangkan pengelola pusat perlu meningkatkan kapasitas dan stabilitas layanan. Kelima, kesesuaian sistem dengan proses organisasi. Sistem informasi harus mendukung alur kerja aktual pemerintah daerah, mulai dari penganggaran hingga pelaporan. Ketika satu aplikasi belum dapat mendukung seluruh kebutuhan operasional secara efektif, muncul penggunaan aplikasi pendamping. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi kesesuaian fitur dan proses bisnis, sekaligus penyusunan prosedur transisi yang menghindari input berulang. Keenam, dukungan pengembang dan instansi pusat. Mekanisme help desk perlu memberikan respons yang cepat, kepastian penyelesaian, dan informasi status penanganan masalah. Dukungan tersebut penting terutama ketika koreksi data membutuhkan kewenangan pengelola sistem pusat. Koordinasi pusat-daerah yang responsif akan mengurangi waktu tunggu dan membantu menjaga kesinambungan proses pelaporan. Ketujuh, manfaat sistem bagi organisasi perlu dievaluasi secara berkala. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari tingkat penggunaan aplikasi atau kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga dari berkurangnya pekerjaan berulang, meningkatnya konsistensi data, ketepatan waktu laporan, dan kemudahan proses audit. Dengan ukuran tersebut, evaluasi SIPD dapat diarahkan pada perbaikan hasil kerja, bukan hanya penyelesaian tahapan input.

Berdasarkan analisis tersebut, implementasi SIPD di Pemerintah Kota Ambon memerlukan pendekatan yang menggabungkan pembenahan teknologi dan penguatan organisasi. SIPD tetap memiliki nilai strategis karena menyediakan standardisasi dan integrasi nasional, sedangkan pengalaman penggunaan SIMDA memberikan pembelajaran mengenai pentingnya fleksibilitas dan kemudahan operasional. Fokus kebijakan ke depan sebaiknya bukan mempertentangkan kedua aplikasi, melainkan memastikan transisi menuju sistem yang terintegrasi berjalan dengan dukungan infrastruktur, kompetensi pengguna, kualitas data, proses bisnis, dan layanan teknis yang memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Ambon belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala dari aspek teknis, organisasi, serta sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari masih digunakannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai sistem pendukung, yang menunjukkan adanya dualisme sistem akibat proses transisi yang belum sepenuhnya tuntas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem baru belum sepenuhnya mampu menggantikan fungsi sistem lama secara efektif. Perbandingan antara SIPD dan SIMDA menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan. SIPD memiliki keunggulan dalam hal integrasi, standarisasi, dan

pengendalian secara nasional, namun masih terbatas dalam fleksibilitas, kemudahan penggunaan, serta sangat bergantung pada infrastruktur jaringan. Sebaliknya, SIMDA lebih fleksibel, stabil, dan mudah dioperasikan sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Dari perspektif teori UTAUT dan *Information System Success Model*, rendahnya efektivitas SIPD dipengaruhi oleh faktor kualitas sistem dan layanan, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya persepsi kemudahan penggunaan, yang berdampak pada belum optimalnya penerimaan pengguna. Penggunaan kedua sistem secara bersamaan berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, terutama dalam bentuk inkonsistensi data, duplikasi pekerjaan, serta keterlambatan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas LKPD tidak hanya ditentukan oleh standar akuntansi, tetapi juga oleh kualitas dan integrasi sistem informasi yang digunakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta tingkat penerimaan pengguna, sehingga diperlukan keselarasan antara aspek teknologi dan pengguna agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SIPD, terutama pada aspek kualitas sistem dan layanan. Perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan stabilitas, kecepatan akses, serta fleksibilitas sistem agar tetap sesuai dengan kebutuhan daerah tanpa mengurangi prinsip standarisasi nasional. Selain itu, dukungan teknis yang lebih responsif sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Pemerintah daerah, khususnya Kota Ambon, perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar aparatur mampu menggunakan SIPD secara optimal. Di sisi lain, integrasi antara SIPD dan SIMDA perlu dilakukan secara bertahap untuk mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan konsistensi data. Ke depan, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif antara standarisasi dan fleksibilitas daerah, serta pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian dapat diperluas dan diperkuat secara empiris berkaitan dengan temuan factor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.

Al-okaily, M., & Al-kofahi, M. (2023). Determinants of user satisfaction with fi nancial information systems in the digital transformation era : insights from emerging markets. *EMERALD PUBLISHING LIMITED*. https://doi.org/10.1108/GKMC-12-2022-0285

Alajmi, M., Mohammadian, M., & Talukder, M. (2023). The determinants of smart government systems adoption by public sector organizations in Saudi Arabia. *Heliyon*, *9*(10), e20394. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20394

Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *July*, 1–23.

Dione, F. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in Increasing Coordination of Regional Development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–28. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061

Juddy Julian Pilat, Jullie J. Sondakh, H. M. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado*.

Kala, D., Chaubey, D. S., Meet, R. K., & Al-adwan, A. S. (2024). Impact Of User Satisfaction With E-Government Services On Continuance Use Intention And Citizen Trust Using Tam-Issm Framework. *Indisciplinary Journal Of Information, Knowledge, And Management*, *19*, 1–22.

Mamary, A., Business, F., Hasan, Y., Mamary, A., Alshallaqi, M., Abubakar, A. A., & Alhakimi, W. (2025). *A comprehensive conceptual model of digital transformation in public services : exploring key factors and their impact on government success*.

Mensah, I. K., Zeng, G., & Luo, C. (2020). *E-Government Services Adoption : An Extension of the Unified Model of Electronic Government Adoption*. https://doi.org/10.1177/2158244020933593

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation : Results from expert interviews ☆. *Government Information Quarterly*, *September 2018*, 1–16.

https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

S. Aliyah, and A. N. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING*, *8*.

Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, *1*(1), 64. https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947

Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). *DIGIBIS: Digital Business Journal*, *1*(1), 1–16.

Wisnu Jabarul Hakim. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku. *Repository IPDN*.

Setiawan, Z., Amali, L. N., & Polin, M. (2023). Analisis Evaluasi Kualitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan ISO/IEC 25010 di BAPPEDA Provinsi Gorontalo. *Diffusion: Journal of Systems and …*, *3*(1), 142–152. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/view/18310%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/diffusion/article/viewFile/18310/5973

Toding, S., & Evi Maria. (2023). Determinants of the Acceptance of Ambon City Local Government Information Systems using the Technology Acceptance Model. *Sistemasi*, *12*(1), 98. https://doi.org/10.32520/stmsi.v12i1.2312

William H. Delone, & Ephraim R. McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, *19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748